

## **BAB 7**

### **STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN**

#### **7.1. Arah Strategi Pengembangan**

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka pilihan strategi yang sesuai untuk dilakukan oleh Kabupaten Bintan dalam pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat adalah dengan **“Strategi Agresif”**. Strategi yang berupaya menggunakan kekuatan untuk kemudian mengambil peluang adalah dikarenakan kondisi lingkungan internal Kabupaten Bintan memang sudah menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan didalam RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021. Disamping kondisi lingkungan internal yang telah memiliki potensi sebagai kekuatan, juga didukung oleh kondisi lingkungan eksternal yang merupakan lingkungan dengan pengaruh globalisasi di era digitalisasi revolusi industri generasi 4.0 merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk diambil dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan.

Dalam mengembangkan objek wisata sebagai daya Tarik kunjungan wisata ke Kabupaten Bintan, maka perlu memperhatikan aspek-aspek seperti Trader, Tourist, Investor (TTI) dan juga Talent, Developer serta Organizaer (TDO) sebagaimana yang disampaikan oleh Kartajaya (2005). Talent adalah SDM berkualitas, Developer adalah pengembang, serta Organizer adalah penyelenggara ataupun travel agency. Untuk menjadi tuan rumah yang baik maka harus terjadi kolaborasi kohesif (*cohesive collaboration*) antara masyarakat (*community*), kalangan bisnis/wirausaha (*entrepreneuers*), dan

pemerintah daerah (*government*). Tiga pelaku utama ini harus mampu saling mengedukasi agar mereka menjadi *knowledgable* dan terus menyamakan persepsi dan gerak mengenai perlunya menarik TTI-TDO dalam rangka mendongkrak produktivitas daerah dan akhirnya standar hidup masyarakat. Kolaborasi kohesif ini diperlukan agar aktivitas masyarakat, operasional bisnis, dan kebijakan pemerintah daerah selaras dan saling menunjang sehingga terbentuk iklim yang baik yang mampu menarik TTI-TDO.

#### **7.1.1. Mengembangkan *Strategic-Entrepreneurial***

Dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi daerah harus mulai digeser dari pendekatan birokratis menjadi pendekatan *strategic-entrepreneurial*. Dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, maka orientasi birokratis yang lebih *procedural* dan baku serta merasa paling tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat, harus juga bergeser dengan mengedukasi masyarakat agar lebih memiliki mental wirausaha dalam pengelolaan aktivitas wisata bahari. Pengelolaan aktivitas wisata bahari yang merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, perlu kiranya mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah. Mereka harus menjadikan mata pencaharian dan pola kehidupan harian mereka menjadi bernilai untuk meningkatkan pendapatan mereka, dari yang menggunakan tenaga sendiri dalam mendapatkan penghasilan, menjadi aktivitas harian menjadi penghasilan. Yang biasanya nelayan melakukan aktivitas memancing, menjadi wisatawan yang memancing tapi mereka yang membayar kepada nelayan atas hasil tangkapannya.

Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat bermakna bahwa apa yang menjadi tradisi kebiasaan masyarakat baik dalam kehidupannya, mata pencahariannya maupun caranya memelihara keadaan alam sekitar. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat juga berupaya untuk keberlangsungan sumber daya alam tetap lestari. Dengan demikian konsep CBT tidak serta merta membuka akses seluas-luasnya pengunjung ke destinasi, namun tetap dalam jumlah yang terbatas eksklusif bagi pengunjung, agar upaya pelestarian alam melalui CBT dapat tercapai. Pola hidup keseharian masyarakat pesisir kepulauan di Bintan di inventarisir untuk kemudian dijadikan aktivitas yang dikemas dalam paket perjalanan wisata bahari berbasis masyarakat. Aktivitas harian itu mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali.

Pemerintah hanya perlu mendukung akses yang menghubungkan antara destinasi wisata modern atau ke destinasi wisata remote yang mengakses ke pantai atau pulau. Akses tersebut berupa jalan dan moda transportasi publik yang murah untuk kepentingan turis baik lokal maupun mancanegara. Selain itu pemerintah juga perlu mendukung dalam hal mempermudah proses perizinan. Dimana perizinan selain menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mengukur capaian pembangunan, adalah juga untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar dapat berwirausaha secara profesional yang juga akan memberikan kenyamanan serta kepastian bagi pengunjung. Perizinan yang diberikan pemerintah memiliki konsekuensi bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam berusaha, terutama keamanan dalam penjagaan keselamatan baik operator maupun wisatawan.

Penjaga keselamatan itu tidak hanya menjaga keselamatan manusia, namun juga keselamatan atas peralatan dan lingkungan.

Dari sisi swasta peran diambil pada sisi kapital. Dan juga dari sisi agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata mempertemukan diantara wisatawan dengan penyedia layanan wisata bahari yang dikelola masyarakat. Agen perjalanan yang melakukan pembayaran atas paket-paket yang sudah dikemas berikut dengan harganya. Bahkan agen perjalanan dapat menjadi tauke yang memfasilitasi pembayaran dimuka untuk masyarakat dapat mempersiapkan keperluan pelayanan bagi wisatawan. Kecenderungan masyarakat masyarakat pesisir dan kepulauan memiliki karakter pola patron klien.

## **7.2. Tahapan pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat.**

Potensi yang dimiliki Kabupaten Bintan saat ini memberikan sisi kekuatan untuk dapat merebut peluang dalam pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat. Keberadaan kawasan pariwisata internasional Lagoi yang eksklusif selama ini harus dapat memberikan efek bagi kehidupan masyarakat disekitar kawasan pariwisata lagoi. Lagoi sebagai titik sentral pintu masuk wisatawan mancanegara harus memberikan akses kepada objek wisata di kawasan remote atau satelit yang dikelola oleh masyarakat sebagai pilihan alternatif bagi wisatawan mancanegara yang ingin menikmati keragaman budaya dan tradisi masyarakat.

Dalam situasi global hari ini telah terjadi perubahan perilaku wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang beralih mencari objek wisata yang natural. Kejenuhan mengunjungi dan menikmati objek wisata bergaya modern dan eksklusif menjadi peluang bagi masyarakat untuk menggaet wisatawan mancanegara, utamanya adalah wisatawan domestik berkunjung dan menikmati sebuah kehidupan yang berbeda dari aktivitas sehari-hari yang mereka jalani.

Kabupaten Bintan diberikan anugerah kondisi alam yang secara alami telah memberikan pesona bagi mereka yang menginginkan berwisata di alam terbuka jauh dari hiruk pikuk suasana metropolitan. Konsep pengembangan pariwisata bernuansa resort yang modern di Lagoi satu ketika akan mengalami kejenuhan dan wisatawan menginginkan keluar dari sebuah konsep yang terbatas tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan perlu untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam kegiatan wisata bahari yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat menjadi sumber ekonomi baru bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan.

Tahapan pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan mengambil jangka waktu tiga tahun menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021. Oleh karena itu tersisa waktu tiga tahun mulai dari 2019 sampai dengan 2021 untuk program pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat ini dapat tumbuh dan mandiri.

**Gambar 6.10 Tahapan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bintan 2019 - 2021**



### 7.2.1. Eksplorasi dan Diversifikasi Objek Wisata Bahari Bintan

Pemerintah Kabupaten Bintan perlu segera menetapkan kebijakan dan peraturan terkait dengan pemanfaatan kawasan-kawasan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata bahari. Peraturan daerah tentang tata ruang akan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan ruang yang tersedia bagi pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Kebijakan mengenai penetapan tata ruang beserta perangkat turunannya akan memudahkan didalam menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat ditawarkan kepada wisatawan untuk dinikmati sebagai objek wisata bahari. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah zona kawasan pesisir pantai dan pulau, zona kawasan bawah laut, serta kawasan hutan mangrove dan sungai.

Setelah ditetapkannya peraturan daerah serta perangkat aturan lainnya, maka sosialisasi pemanfaatan ruang tersebut perlu dilakukan kepada masyarakat yang berada didalam kawasan. Sosialisasi tersebut diperlukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan kawasan yang tidak bertentangan dengan peraturan, serta dapat

meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan disekitar kawasan.

Pada tahap pertama (baseline 2019) perlu dilakukan eksplorasi dan inventarisir destinasi wisata bahari di Kabupaten Bintan yang tersebar di sepuluh kecamatan. Eksplorasi dan inventarisir destinasi wisata dilakukan dengan berpedoman pada peraturan daerah tentang tata ruang. Selanjutnya hasil dari eksplorasi dan inventarisir dipetakan untuk mempermudah menentukan lokasi-lokasi yang akan dipilih baik untuk intervensi oleh pemerintah Kabupaten Bintan, maupun oleh pihak swasta dalam hal ini agen perjalanan wisata, serta para wisatawan bebas yang berbasis sebagai netizen. Serta masyarakat yang menjadi operator sekaligus penduduk setempat yang berada langsung di lokasi wisata bahari. Adapun hasil inventarisir destinasi berikut dengan aktivitasnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**Tabel 6.4 Klasifikasi Destinasi, Objek, dan Aktivitas wisata bahari di Kabupaten Bintan**

No	IDENTIFIKASI PARIWISATA BAHARI
1	Kegiatan pariwisata ini dilakukan di kawasan pulau-pulau kecil dan dihuni oleh penduduk dengan jumlah yang relatif kecil
2	Kawasan tersebut memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas, terutama jika berkaitan dengan aplikasi teknologi tinggi (motorisasi
3	Kegiatan pariwisata maritim mensyaratkan pembatasan jumlah wisatawan dalam suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk menjaga daya dukung lingkungannya di satu sisi, dan untuk memberikan kenyamanan/pengalaman wisata yang optimal bagi pengunjung di sisi lainnya
4	Karena jenisnya beragam (snorkeling, diving, fishing, sailing, dan lain-lain), maka aktivitas wisata ini umumnya berdurasi panjang
5	Aktivitas pariwisata maritim cenderung <i>mobile</i> dalam artian berpindah dari satu lokasi/kawasan ke kawasan lain

**Tabel 6.5 Pembagian Wilayah Pengembangan Pariwisata dan sasaran tata kelola pariwisata bahari di Kabupaten Bintan**

WILAYAH	ATRAKSI	AKSESIBILITAS	AMENITAS	MASYARAKAT
<b>4 (Empat) Koridor Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah<sup>1</sup></b> <b>a. Kawasan Wisata Internasional Lagoi</b> <b>b. Kawasan Wisata Pantai Trikora</b> <b>c. Kawasan Wisata Gunung Bintan</b> <b>d. Kawasan Wisata Sungai Lepah.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Tarik Wisata Alam;</li> <li>• Daya Tarik Wisata Budaya;</li> <li>• Daya Tarik Wisata Buatan Manusia<sup>2</sup></li> <li>• Wisata Khusus<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasarana transportasi</li> <li>• Sarana transportasi</li> <li>• Sistem transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasarana Umum</li> <li>• Fasilitas Umum</li> <li>• Fasilitas pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan CBT</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat</li> <li>• Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat</li> </ul>

Sumber: diadaptasi dari (1) Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan; (2) Paparan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata (BDIP) Kementerian Pariwisata pada RAKORNAS KEMENPAR 27 Januari 2016 (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

**Tabel 6.6 Potensi Aktivitas Wisata Bahari Di Kabupaten Bintan**

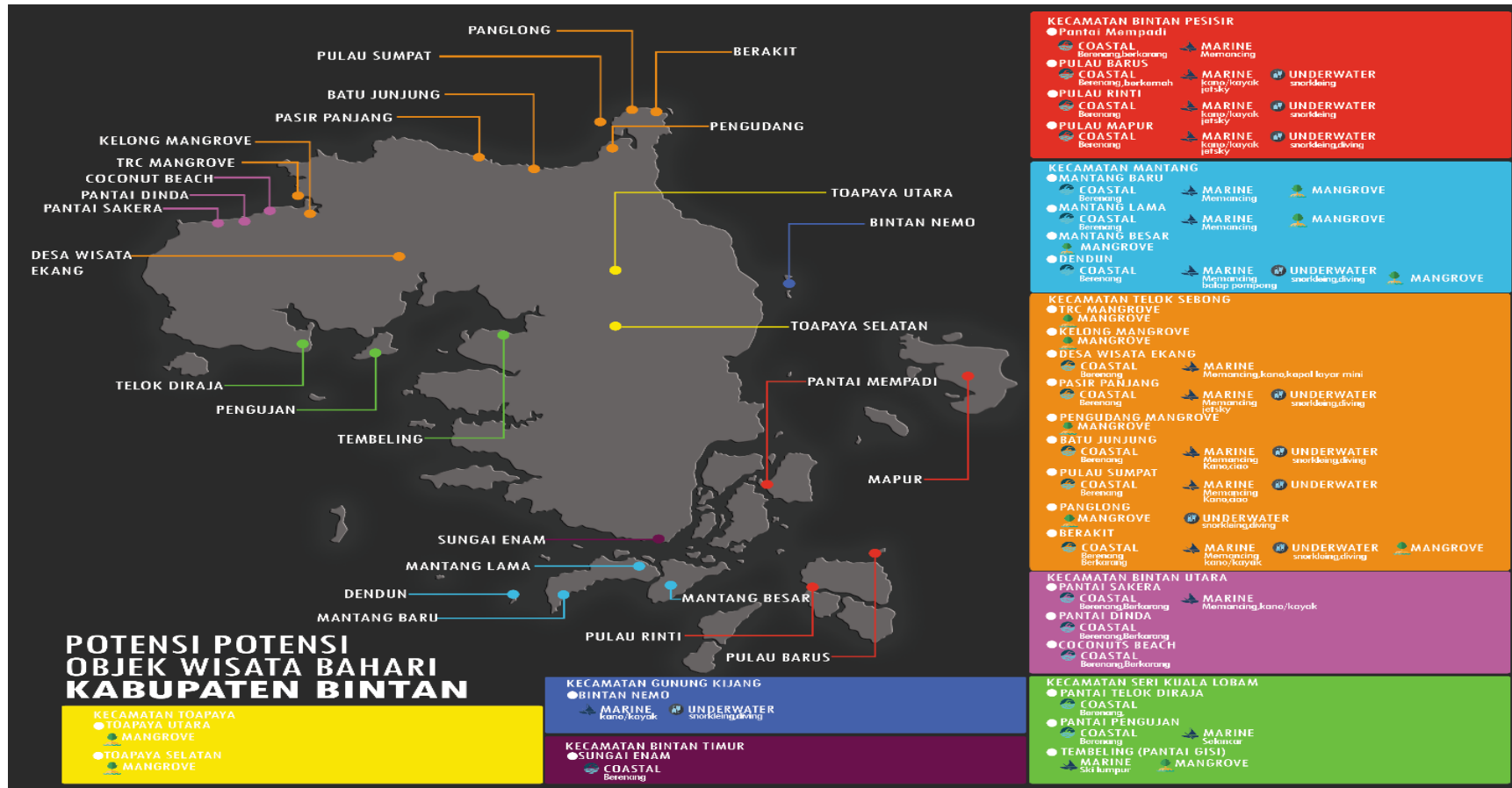
NO	AKTIVITAS WISATA	DESKRIPSI
1	<b>Rekreasi Pantai</b>	Aktivitas yang dilakukan pengunjung pada wisata rekreasi pantai umumnya bersantai, bermain air, atau berenang di tepi pantai (Hidayat 2011), serta menikmati pemandangan dan panorama alam, seperti matahari terbit (sunrise) ataupun matahari terbenam (sunset) (Sanam dan Adikampana 2014).
2	<b>Mangrove</b>	Sebagai objek wisata yang dapat dikategorikan ekowisata, Wisatanya adalah ekosistem mangrove keragaman serta biota berikut lingkungan sekitarnya.
3	<b>Selam Diving</b>	– Wisata selam dilakukan untuk melihat keindahan terumbu karang bawah air dengan menyelam ke dalam



		kolom perairan sampai kedalaman tertentu. Pengunjung disuguhkan dapat melihat dengan lebih jelas keindahan taman dalam laut berisi hamparan karang berikut dengan biota laut.
4	<b>Selam permukaan - Snorkling</b>	Wisata snorkeling juga dilakukan untuk melihat keindahan terumbu karang bawah air, namun dengan tetap berada di permukaan perairan. Wisatawan yang melakukan aktivitas wisata akan menikmati keindahan bawah air dari permukaan perairan
5	<b>Lamun</b>	Lamun dengan tutupan yang lebih tinggi lebih menarik untuk dinikmati pengunjung. Perairan yang lebih cerah akan memudahkan pengunjung untuk menikmati keindahan hamparan lamun dari permukaan perairan. Keberadaan ikan atau biota lain yang beragam menjadi daya tarik lebih bagi ekosistem lamun sebagai wisata lamun. Perairan yang tenang dan dangkal lebih memudahkan pengunjung dalam menikmati wisata lamun.
6	<b>Memancing</b>	Wisata pancing merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya perikanan untuk kesenangan atau olahraga serta dapat dilakukan di laut, pinggir pantai, di danau atau di atas perahu
7	<b>Wisata Selancar</b>	Teridentifikasi sebagai bagian dari sport tourism, Wisata selancar (surfing) merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan perairan dengan menggunakan papan selancar. Wisata selancar memanfaatkan ombak atau gelombang perairan

*Sumber: Diadaptasi dari Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari-Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2018*

**Gambar 6.11 Identifikasi Sasaran Awal dan Klasifikasi Potensi Objek Wisata Bahari di Kabupaten Bintang**



Sumber : Tim P3M STISIPOL Raja Haji, 2018

Berdasarkan peta potensi eksisting objek wisata bahari di Kabupaten Bintan diatas dapat diketahui bahwa konsentrasi penyebaran objek wisata berada pada destinasi di Kecamatan Teluk Sebong. Kawasan teluk sebong merupakan kawasan yang berdekatan dan berbatasan dengan kawasan wisata terpadu lagoi. Objek-objek wisata tersebut dapat menjadi destinasi tambahan bagi wisatawan yang sedang berlibur di hotel dan resort yang berada didalam kawasan wisata lagoi. Untuk di kecamatan lainnya masih sangat potensial untuk terus dieksplorasi dan dikembangkan sebagai destinasi kunjungan wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik yang berbasis pada pengelolaan oleh masyarakat.

## **7.2.2. Program Fasilitasi Sarana Pendukung Wisata Bahari**

### **7.2.2.1. Pengembangan Aksesibilitas**

Secara bersamaan pemerintah Kabupaten Bintan perlu untuk mensinergikan aktivitas pembangunan sarana dan prasana fisik yang ditujukan untuk mengintegrasikan aksesibiliti dari dan menuju destinasi wisata bahari berbasis masyarakat. Berdasarkan inventarisir dan pemetaan yang telah dilakukan, kemudian dihubungkan antara satu titik ketitik lainnya agar dapat terhubung dan mempermudah pergerakan wisatawan baik mancanegara yang melalui pintu masuk kawasan wisata lagoi, ataupun wisatawan domestik yang melalui pintu masuk melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang, Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, dan Pelabuhan Bulang Linggi di Tanjung Uban. Salah satu fasilitas pelabuhan yang perlu untuk dapat dioperasikan adalah Pelabuhan di Tanjung Berakit di Desa Berakit. Fasilitas pelabuhan yang sudah ada ini belum dibuka karena kendala operasional. Jika pelabuhan ini dibuka, maka akan mempermudah kunjungan wisatawan dari mancanegara terutama Malaysia dan Singapura untuk datang ke destinasi wisata di Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk Sebong.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan akan mendukung dalam mempermudah akses dari pintu masuk pulau bintan menuju destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat. Beberapa lokasi yang terdapat di Kabupaten Bintan masih ada yang akses jalannya berupa jalan tanah, bahkan jalan setapak, sehingga diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan.

Moda transportasi umum dan transportasi khusus wisata yang regular juga perlu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk dapat menjangkau destinasi wisata dari pintu perbatasan Kota Tanjungpinang dan pintu masuk pelabuhan Tanjung Uban serta dari Kawasan Wisata Lagoi. Moda transportasi tersebut juga perlu mempertimbangkan tarif sekali jalan dengan biaya yang murah dibandingkan dengan tarif kendaraan sewa yang selama ini telah digunakan wisatawan untuk menjangkau tempat-tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat. Pengembangan kerjasama transportasi online juga dapat menjadi alternative penyediaan sarana transportasi dari pintu masuk ke destinasi wisata tujuan.

Jaringan listrik yang ada saat ini meskipun telah tersedia daya yang cukup untuk dialirkan ke destinasi wisata bahari yang dikelola oleh masyarakat, namun masih terkendala dengan jaringan lokal dari gardu yang ada di sepanjang jalan utama menuju ke lokasi wisata. Lokasi wisata yang ada di pesisir pantai atau bahkan lokasi yang menjadi tempat pendaratan mangrove memerlukan beberapa tiang listrik agar dapat tersalurkan ke lokasi pemukiman penduduk yang mengelola aktivitas wisata.

Jaringan komunikasi bergerak dan juga akses internet perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan. Meskipun beberapa provider seluler telah berinvestasi dengan memasang tower pemancar sinyal yang juga integrasi dengan internet, hanya beberapa wilayah di Kabupaten Bintan yang belum terjangkau sinyal seluler dengan baik. Akan tetapi tidak semua destinasi memerlukan akses internet, namun tetap memerlukan akses komunikasi

bergerak yang baik. Karena kepentingan wisatawan yang membutuhkan privacy tentu juga harus membatasi akses terhadap penggunaan fasilitas internet.

#### **7.2.2.2. Program Pengembangan Amenitas**

Pengembangan objek wisata bahari berbasis masyarakat salah satu cirinya adalah dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Potensi aset yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Bintan dapat dijadikan modal awal untuk menjalankan aktivitas wisata bahari oleh masyarakat. Masyarakat nelayan di pesisir dan pulau yang ada di Kabupaten Bintan memiliki tempat tinggal dan peralatan untuk mereka bekerja sebagai mata pencaharian sehari-hari seperti perahu dan juga pompong. Sebagian nelayan juga memiliki kelong ikan yang merupakan rumah tempat menangkap ikan yang berada di atas laut. Aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan selain untuk mereka bekerja, juga menjadi fasilitas hospitality berupa tempat tinggal yang dapat disewakan dalam bentuk Home Stay. Meskipun harga membangun sebuah kelong cukup mahal saat ini berkisar diantara Rp. 110 juta sampai Rp. 150 juta, namun bukan berarti Pemerintah Kabupaten Bintan yang harus menyediakannya. Pemerintah hanya perlu mendata kepemilikan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Penyediaan fasilitas Homestay apabila ingin diintegrasikan dengan kegiatan bantuan sosial pemerintah, dapat dilakukan dengan intervensi pada program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dimana pemerintah melalui OPD terkait dapat memberikan Pedoman berupa desain yang memenuhi kriteria sebagai sebuah homestay. Sehingga rumah yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten Bintan dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan juga sebagai homestay.

Sedangkan peralatan nelayan untuk menangkap ikan berupa pompong dan perahu dapat ditetapkan kriterianya yang memenuhi standar keselamatan bagi wisatawan. Pemerintah perlu melakukan monitoring terhadap kelayakan pompong dan perahu yang dimiliki oleh nelayan, dan dapat memberikan bantuan berupa alat keselamatan di laut seperti pelampung dan juga aplikasi GPS.

Pemerintah perlu mengurangi memberikan bantuan peralatan ataupun keuangan kepada masyarakat pengelola wisata bahari supaya terbangun kemandirian sebagai motivasi untuk berusaha. Hasil evaluasi atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat seringkali tidak efektif disebabkan tidak sesuai dengan yang mereka perlukan dan mereka tidak terbiasa menggunakan peralatan yang diberikan.

Selain dari sarana yang disebutkan diatas, yang perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi adalah persoalan sanitasi. Sanitasi menjadi hal penting untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Program sanitasi dapat saja dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan serta perumahan dan pemukiman. Program Kabupaten Bintan Bebas Buang Air Besar Sembarangan yang sudah canangkan sejak Tahun 2012 menjadi acuan bahwa Kabupaten Bintan memiliki sanitasi yang baik dilingkungan masyarakat masyarakat. Sanitasi merupakan hal penting didalam memberikan hospitality bagi para wisatawan, apakah wisatawan yang hanya berkunjung dalam satu hari atau yang memilih untuk menginap dan tinggal bersama masyarakat. Sanitasi layak untuk umum dan sanitasi layak untuk tempat tinggal masyarakat juga harus disesuaikan dengan kenyamanan yang diperlukan oleh wisatawan. Peningkatan kualitas sanitasi umum seperti MCK di destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat perlu disediakan dan dirawat secara baik disetiap destinasi wisata bahari yang ada. Sanitasi yang disediakan juga harus memperhatikan keberlangsungan daya dukung lingkungan.

#### **7.2.2.3. Program Pengembangan Atraktif**

Aktivitas wisata yang selama ini telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang bekerjasama dengan pihak event organizer di kawasan wisata lagoi belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat disekitar wilayah satellite kawasan lagoi. Mereka yang mengikuti even-even yang diselenggarakan oleh pihak pengelola kawasan wisata lagoi dan Pemerintah

Kabupaten Bintan masih dalam bentuk *Sport Tourism* yang memang merupakan wisata berhubungan dengan hobby olahraga. Sedangkan aktivitas wisata bahari yang dikelola oleh masyarakat lebih banyak menjalankan tradisi ataupun kebiasaan mereka sehari-hari. Even-even berkaitan dengan upacara adat, permainan rakyat, penelusuran sejarah dan edukasi perlu juga difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam mendukung pengembangan objek wisata bahari yang nilai edukasi dari aktivitasnya lebih memiliki muatan spesifik bagi wisatawan untuk diketahui.

### **7.2.3. Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan**

#### **7.2.3.1. Pengembangan *Community Based Tourism***

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan wisata bahari di Kabupaten Bintan akan tidak berjalan dengan baik jika kapasitas masyarakat dan kelembagaannya tidak diperbaiki. Karakteristik masyarakat di pesisir dan kepulauan yang sangat bergantung dengan kondisi alam telah membentuk mentalitas mereka untuk pasrah pada keadaan yang ditentukan oleh kondisi alam. Masyarakat pesisir dan pulau mendapatkan stereotype dan labelling secara kultural yang dianggap tidak dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir yang mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan usaha dibidang kepariwisataan, maka perlu dilakukan aktivitas yang mendorong masyarakat merubah cara pandang dalam berusaha. Perlu dilakukan penyadaran dan pendampingan atas aktivitas pengelolaan wisata. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh pegiat wisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan, diperlukan waktu paling sedikit dua tahun untuk dapat merubah perilaku dari digerakkan menjadi bergerak sendiri. Karakteristik sosial masyarakat pesisir yang tidak menyukai hal-hal yang tidak pasti (*uncertainty avoidance*) menyebabkan mereka bertahan dengan kehidupan yang sudah secara turun temurun mereka jalankan. Pengembangan

ekonomi berbasis wisata bahari bagi masyarakat pesisir dan pulau di Kabupaten Bintan tidak akan banyak merubah perilaku sehari-hari mereka. Sebab aktivitas biasa yang mereka lakukan sendiri dapat disejajarkan dengan aktivitas wisata bahari yang memang tidak merubah lingkungan keseharian mereka. Aktivitas mereka mulai dari bangun pagi, makan, dan kemudian bekerja di laut serta berinteraksi dengan lingkungan adalah merupakan aktivitas yang bernilai wisata bahari yang dapat mendatangkan penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Hasil tangkapan yang biasanya dijual kepada para penampung dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran akan bernilai lebih ketika mereka oleh menjadi makanan keseharian mereka untuk kemudian dinikmati oleh wisatawan yang datang dan tinggal bersama mereka. Aktivitas harian berupa turun kelaut untuk memancing ataupun pergi ke kelong di laut, akan menjadi aktivitas yang punya nilai ekonomi tambahan bahkan lebih ketika dilakukan bersama dengan wisatawan yang ikut bersamanya.

Agar aktivitas itu dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pendekatan Merubah Mindset dan Motivational Training melalui program pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan dengan menggerakkan tenaga penyuluh lapangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan juga menggerakkan tenaga pendamping lokal desa. Selain tenaga penyuluh dan pendamping yang ada di Pemerintahan, pelibatan perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata/Lapangan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan cara pandang masyarakat dan menanamkan kepercayaan diri bahwa apa yang mereka lakukan nantinya memang akan dapat merubah mereka menjadi lebih baik. Pihak-pihak swasta dalam hal ini biro perjalanan ataupun agen perjalanan juga perlu untuk dilibatkan dalam tahapan perubahan cara pandang masyarakat. Jika semua stakeholder sudah bersama-sama melakukan pendekatan dan memberikan dorongan serta pendampingan, maka diharapkan tahapan memperkuat kapasitas CBT ini dapat berjalan lebih cepat.



Pemerintah memfasilitasi peningkatan kapasitas baik personal maupun kelembagaan melalui pelatihan pemandu wisata (*Tour Guide*), *housekeeping*, kuliner, kemampuan Bahasa asing, dan perencanaan keuangan. Pemerintah juga mendorong untuk masyarakat memiliki sertifikasi atas produk pelayanan dan jasa yang mereka tawarkan agar wisatawan memiliki kepercayaan kepada operator, diantaranya sertifikasi halal untuk makanan yang disajikan, sertifikasi kelayakan peralatan dan moda transportasi, sertifikasi kebersihan dan kesehatan tempat tinggal dan makanan, sertifikasi kompetensi pemandu wisata. Dan bisa saja semua sertifikasi tersebut dijadikan satu paket dalam satu buah uji kelayakan saja dengan satu sertifikasi agar mempermudah masyarakat dalam memenuhinya serta merupakan subsidi pemerintah. Peran pemerintah selanjutnya adalah dengan memfasilitasi akses bertemunya antara wisatawan dengan masyarakat melalui agen perjalanan lokal dan internasional.

Menanamkan *sense of belonging* (rasa memiliki) bagi masyarakat terhadap fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah, termasuk yang mereka sediakan sendiri serta dukungan pihak swasta dalam bentuk CSR merupakan sebuah modal sosial yang harus dipertahankan. Membangun komitmen melalui pakta integritas dalam menjaga dan merawat fasilitas umum pendukung aktivitas pariwisata akan dapat mempertahankan keberlanjutan atas aktivitas pariwisata bahari yang dijalankan oleh masyarakat. Pencatatan aset bersama baik oleh pemerintah Kabupaten Bintan dan juga pemerintah desa serta masyarakat akan mempermudah pemeliharaan dan perbaikan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Mendorong masyarakat untuk kembali menggalakkan budaya gotongroyong dalam memelihara fasilitas pendukung wisata bahari, apakah dalam rangka menjaga kebersihan, ataupun memperbaiki fasilitas-fasilitas pendukung.

### **7.2.3.2. Penguatan Kelembagaan**

Aspek kelembagaan merupakan tantangan didalam mengembangkan wisata bahari berbasis masyarakat. Definisi masyarakat yang mencerminkan adanya sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan-kesamaan dan juga tujuan yang sama didalam suatu lingkungan tertentu belum tentu mereka dapat disatukan dalam satu kelembagaan. Program-program bantuan pemerintah yang selama ini mensyaratkan terbentuknya kelompok seringkali tidak berjalan efektif. Hal tersebut tidak terlepas dari

Masyarakat menginginkan pendapatan yang pasti seperti menerima gaji. Dari aktivitas wisata bahari ini, masyarakat bersedia ikut menjalankan asalkan mendapatkan gaji setiap bulannya. Karakteristik yang seperti ini didukung oleh kultur mereka yang tidak dapat bekerja didalam kelompok, dalam urusan untuk mendapatkan penghasilan ataupun urusan mata pencaharian. Hal tersebut sejalan dengan peribahasa yang tertanam dalam nilai-nilai kultural masyarakat melayu yaitu “Jangan jaga tepi kain orang” yang jika dikaitkan dengan urusan pendapatan, mereka tidak ingin mencampuri apa serta berapapun yang diperoleh oleh tetangga ataupun sesame nelayan. Karakteristik nelayan pesisir yang pergi kelaut mencari ikan secara individual dan juga membangun kelong dengan kemampuan sendiri memberikan gambaran bahwa masyarakat nelayan pesisir dan pulau di Kabupaten Bintan tidak sesuai jika dikelompokkan dalam sebuah kelompok usaha. Kesediaan mereka bekerja dalam sektor wisata bahari dengan imbalan gaji bulanan juga memperkuat bahwa masyarakat nelayan pesisir memiliki karakteristik individualistik.

Dengan keadaan yang seperti itu, maka perlu dilakukan redesain atas kelembagaan dalam pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat. Desain yang merubah bentuk kelompok yang bersifat horizontal dan gotongroyong dan kesetaraan, menjadi sebuah kelompok bisnis berorientasi kemitraan. Kemitraan yang dibangun adalah melalui kolaborasi diantara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), TAUKE dan Masyarakat nelayan (relasi patron klien). Kolaborasi

tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan destinasi wisata dan aktivitas/aktraksi BUMDes yang dikelola dengan komposisi kepemilikan saham (share holder) terdiri dari Pemerintah Desa melalui BUMDes, Tauke (pengusaha lokal tempatan) dan juga masyarakat nelayan setempat. Potensi penggunaan dana desa dalam pengembangan wisata bahari di desa sejalan dengan program Kementerian Desa mulai Tahun 2017 yang mengalokasikan 40% dana desa direkomendasikan untuk 4 program prioritas pembangunan desa, yang salah satunya adalah pendirian BUMDes guna menjadi motor penggerak ekonomi desa yang difungsikan sebagai unit usaha layanan, baik perdagangan, jasa serta usaha keuangan desa. Selain itu juga dimungkinkan pemanfaatan dana tersebut untuk pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, dalam hal ini jika dikaitkan dengan potensi desa-desa pesisir dan pulau yang ada di Kabupaten Bintan memiliki potensi unggulan wisata bahari.

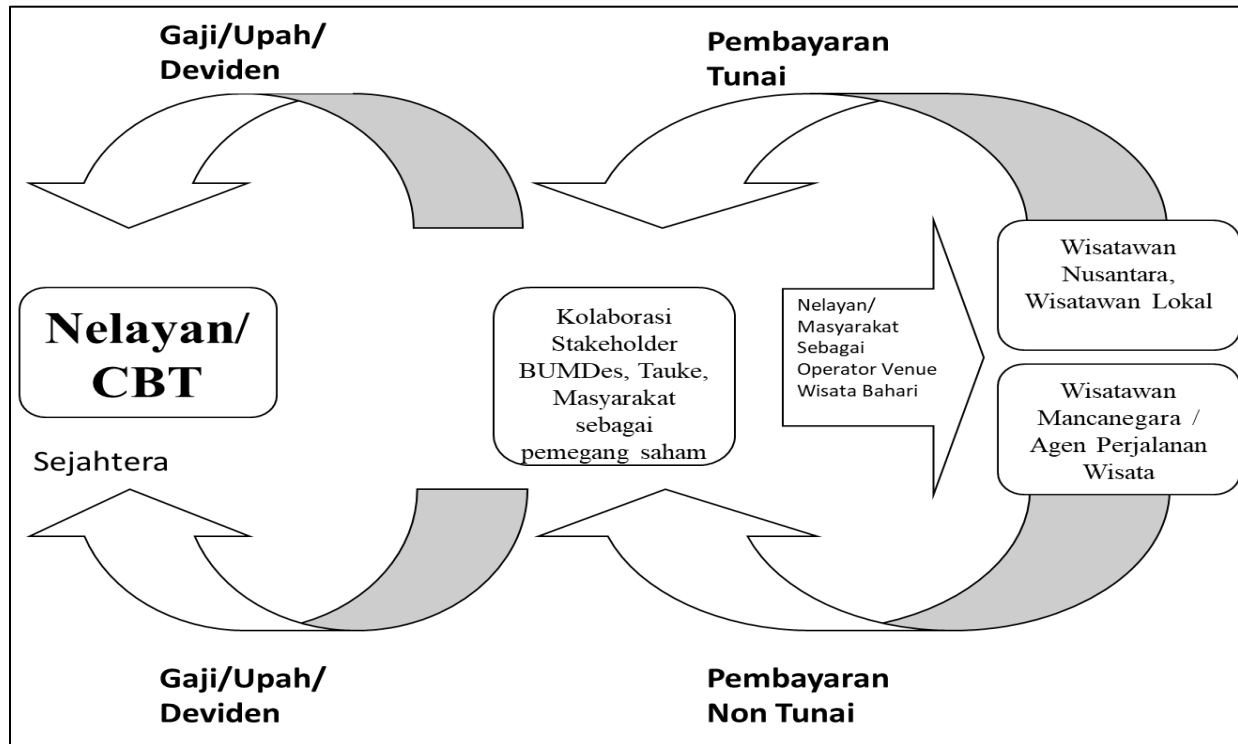
Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes perlu mempertimbangkan kearifan lokal setempat. Kearifan lokal yang dimaksud adalah pola siklus ekonomi masyarakat desa yang terikat dengan sistem *patron-client*. Jika selama ini program pemerintah selalu berupaya untuk menyingkirkan Tauke, maka dalam kajian ini peran tauke dapat dimanfaatkan untuk membentuk sebuah kelembagaan ekonomi bernama BUMDes. Dimana Tauke dapat dilibatkan baik sebagai pemegang saham ataupun juga sebagai manajemen perusahaan, atau dapat dilibatkan kedua-duanya, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai manajerial perusahaan. Sedangkan pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dapat mengalokasikan anggaran dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan. Pihak desa harus memiliki minimal 51% atas kepemilikan saham BUMDes dan sisanya dapat dilepas kepada publik, yaitu tauke dan masyarakat desa (setiap kepala keluarga). Alokasi dana desa yang merupakan transfer pemerintah pusat langsung kepada pihak desa dengan nilai nominal mencapai sampai dengan lebih dari satu miliar dapat dimanfaatkan untuk membentuk BUMDes. Bahkan

program-program pemerintah lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat dapat juga dialihkan dalam bentuk kepemilikan sertifikat saham kepada Kepala keluarga yang ada di desa.

Untuk membentuk system tata kelola BUMDes yang professional dalam mengelola wisata bahari, maka sebaiknya yang menduduki posisi sebagai direktur ataupun sebutan lainnya adalah merupakan orang professional. Orang professional yang dimaksud adalah bisa direkrut secara terbuka, atau berdasarkan komposisi pemegang saham. Salah satu yang dapat ditunjuk untuk menjadi pengurus BUMDes adalah Tauke. Keterlibatan tauke akan dapat memberikan kepastian bagi berlangsungnya bisnis dari BUMDes. Hal ini dikarenakan jaringan modal dan jaringan pemasaran yang sudah dimiliki oleh Tauke akan dapat diteruskan melalui BUMDes.

Sebuah tantangan yang akan dihadapi adalah ketika tauke tidak bersedia terlibat dalam BUMDes karena akan mengurangi keuntungan yang diperoleh adalah dengan memberikan jaminan keamanan dalam berbisnis. Dengan menggunakan label badan usaha milik pemerintah desa, akan dapat mengurangi biaya-biaya ekstra yang dikeluarkan (pungli). Jika tauke tidak bersedia terlibat dalam BUMDes maka pihak desa dapat melakukan rekrutmen secara terbuka dengan mengundang professional-profesional muda ataupun *fresh graduate* untuk menjadi manajer-manajer professional dalam mengelola BUMDes wisata bahari agar memperoleh keuntungan.

**Gambar 6.12 Model Pengembangan CBT berbasis Kelembagaan BUMDes dengan Pola Kolaborasi Stakeholder**



Sumber: Sanopaka, 2018

#### **7.2.3.3. Fasilitasi Masyarakat Dalam Kelembagaan BUMDes**

Masyarakat masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kabupaten Bintan sebagian besar adalah suku melayu. Mereka hidup dengan kearifan lokalnya yang tidak ambisius dalam mengejar kekayaan dan sering dianggap tidak memiliki produktivitas. *Stereotype* yang dilekatkan pada masyarakat melayu pesisir adalah “Melayu Pemalas”. Hal tersebut didasarkan pada pola masyarakat nelayan pesisir yang mencari ikan dilaut hanya seperlunya saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk disimpan atau ditabung untuk masa depan. Apa yang mereka peroleh langsung dimanfaatkan atau dinikmati pada hari yang sama. Sehingga beberapa program pemberdayaan pemerintah

yang berupaya menggerakkan ekonomi masyarakat melayu pesisir tidak berjalan efektif.

Karakter masyarakat melayu pesisir seperti itu tidak dapat serta merta dirubah untuk menjadi wirausaha dalam bidang wisata bahari berbasis masyarakat. Program-program pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kelompok usaha tidak dapat berjalan efektif dikarenakan factor kultural. Kebiasaan masyarakat melayu pesisir yang selalu ingin instan dan cepat lebih besar dipengaruhi oleh kondisi geografis masyarakat melayu pesisir yang menyediakan semua yang diperlukan dengan begitu mudahnya. Program merubah kebiasaan masyarakat nelayan pesisir dari perikanan tangkap menjadi perikanan budidaya seringkali menjadi sia-sia karena mereka tetap memilih cara menangkap ikan dilaut dari pada membudidayakan. Begitu juga ketika kita akan menambah aktivitas mata pencahariannya dari seorang nelayan menjadi pengelola wisata bahari. Dari hasil kajian lapangan ditemukan bahwa masyarakat bersedia terlibat dalam mengelola wisata bahari, tapi sebagai operator yang mendapatkan gaji dari usaha wisata bahari berbasis masyarakat yang jalankan. Dengan hanya mengandalkan gaji saja, maka tujuan dari pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan tidak akan tercapai, sebab hanya merubah mata pencaharian dari nelayan menjadi operator wisata saja.

Dengan keadaan masyarakat yang demikian pihak pemerintah harus merubah kebijakan ataupun program dalam pemberdayaan masyarakat. Karakter budaya masyarakat sangat sulit untuk dirubah ketika karakteristik geografisnya berbeda dengan keinginan pembuat kebijakan. Akan tetapi pemerintah tidak dapat membiarkan masyarakat nelayan pesisir tanpa alternative kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat selain hanya terpenuhinya kebutuhan mereka sehari-hari. Akan tetapi masyarakat nelayan pesisir perlu untuk diintervensi dengan kebijakan yang hasilnya sama dengan sifat menyimpan. Salah satu alternatifnya adalah dengan pola “*passive income*”

yang menurut pandangan dalam kajian ini memiliki kesamaan dengan keinginan dan karakter dari masyarakat melayu pesisir.

Pola “*passive income*” sebagaimana yang disampaikan oleh Robert T Kiyosaki dalam bukunya (Kiyosaki: 2011) yang dimaksud adalah dalam bentuk kepemilikan saham didalam lembaga BUMDes. Dengan kepemilikan saham didalam BUMDes maka masyarakat akan dapat menikmati deviden dari hasil usaha BUMDes yang dikelola secara professional melalui kolaborasi diantara Tauke-Pemerintah Desa-Masyarakat. Setiap masyarakat akan diberikan sertifikat kepemilikan saham dengan nilai minimal sebagaimana yang ditentukan didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Yang dapat dimasukkan kedalam pemilik saham BUMDes adalah Kepala Keluarga. Sertifikat saham yang dimiliki tidak dapat diperjualbelikan tapi dapat diwariskan. Bagi kepala keluarga yang ingin memperbesar deviden maka dapat membeli saham ataupun menambah nilai saham yang dimilikinya. Pembagian deviden dapat diperhitungkan setiap tahun atau setiap bulannya dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian selain masyarakat bekerja dalam bidang wisata bahari yang tidak merubah kebiasaan mata pencahariannya, tapi mereka juga memiliki cadangan keuangan. Cadangan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan saat cuaca ekstrim selama beberapa bulan yang menyebabkan nelayan tidak dapat turun melaut.

#### **7.2.4. Mengembangkan Sistem Jaringan Pemasaran Online Berbasis Media Sosial**

Pada tahapan rintisan ini, selain melakukan eksplorasi dan diversifikasi destinasi wisata bahari di Kabupaten Bintan, juga perlu dibangun jaringan promosi yang berbasis pada media sosial. Program tersebut dapat dimulai dengan memberikan penguatan literasi digital (pandai menggunakan media digital) kepada pelaku usaha wisata bahari berbasis masyarakat. Literasi digital perlu diperkuat ditingkat masyarakat agar mereka dapat mempergunakan dan memanfaatkan saluran-saluran digital dalam bentuk media sosial untuk

mempromosikan destinasi wisata bahari. Membangun jaringan pemasaran online selanjutnya adalah dengan melakukan Pertemuan diantara pelaku wisata bahari dan penggiat media sosial serta blogger. Pelaku wisata bahari diantaranya adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Agen perjalanan wisata, Pemandu Wisata, operator pengelola destinasi wisata, yang bersinergi dengan penggiat media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata bahari baik destinasi rintisan, tumbuh, dan berkembang. Dengan membangun jaringan media sosial (netizen) dan blogger akan memangkas biaya promosi melalui iklan baik media cetak, media elektronik dan media reklame yang berbiaya tinggi.

#### **7.2.5. Tahapan Pengembangan Lanjutan di Tahun 2020**

##### **7.2.5.1. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan**

Program-program yang telah dilaksanakan di tahun 2019, dilanjutkan kembali di tahun 2020 dalam rangka penguatan. Diantaranya adalah program penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dari wisata bahari berbasis masyarakat. Diperlukan waktu dua tahun untuk masyarakat baik secara individu maupun secara kelembagaan BUMDes didampingi oleh stakeholder yang saling berkolaborasi. Stakeholder tersebut adalah penyuluh lapangan dan pendamping lokal desa serta tenaga ahli desa, OPD terkait dinas pariwisata dan BPMD. Mitra perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah serta agen perjalanan wisata. Diharapkan pada tahun kedua pemantapan kapasitas masyarakat akan memperkuat motivasi dan mentalitas untuk menjalankan usaha wisata bahari berbasis masyarakat.

##### **7.2.5.2. Launching Kampung Wisata Bahari**

Setelah eksplorasi dan klasifikasi atas destinasi dan objek wisata bahari ditetapkan, maka identitas atas destinasi wisata bahari di Kabupaten Bintan perlu untuk menetapkan branding dengan nama “Kampung Wisata Bahari”. Pemilihan konsep Kampung didasarkan pada karakteristik lokal dan teritorial. Meskipun dalam nomenklatur dan dokumen perencanaan baik di tingkat



kementerian dan pemerintah Kabupaten Bintan istilah yang dipergunakan adalah “Desa Wisata”. Pemilihan konsep kampung wisata bahari didasarkan pada wilayah cakupan dari objek wisata yang tidak merangkumi keseluruhan wilayah desa dalam batas-batas administrasi. Kondisi geografis perdesaan di Kabupaten Bintan yang terpisah oleh laut dan juga kontur pesisir pantai menjadikan focus pengembangan wisata bahari tidak menyeluruh, melainkan hanya sebagian. Karena wilayah cakupannya adalah terbatas, maka istilah kampung sebagai bagian dari desa dipergunakan untuk membangun identitas wisata bahari dari setiap destinasi dan objek wisata bahari.

Launching kampung wisata dapat dilakukan secara terpusat di tingkat Kabupaten, ditingkat kecamatan atau dimasing-masing destinasi wisata bahari secara serentak dalam waktu bersamaan atau dalam jarak waktu tertentu. Membangun branding “Kampung Wisata” dalam mendukung icon besar wisata bintan yaitu “*Bintan Breathtaking Journey*”. Kampung wisata akan menjadi objek satelit dari Kawasan Wisata Strategis Nasional Pariwisata, dalam hal ini adalah Kawasan Wisata Lagoi. Kampung Wisata dapat diklasifikasi mulai dari kampung wisata rintisan, tumbuh, dan pengembangan.

#### **7.2.5.3. Mengintegrasikan Sistem Keamanan Dan Keselamatan CBT (*Coast Guard Dan SAR*)**

Salah satu aspek penting yang harus diberikan oleh pemerintah adalah jaminan keamanan dan keselamatan dalam menjalankan usaha wisata bahari. Jaminan keamanan dan keselamatan tersebut diberikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak pengelola objek wisata, dan juga wisatawan. Resiko yang dihadapi dalam menjalankan usaha wisata bahari cukup besar karena berhubungan dengan situasi alam yang tidak menentu walaupun dapat diprediksi. Kondisi Geografis Kabupaten Bintan dengan pengaruh musim angin utara dan selatan sangat berpengaruh dalam usaha wisata bahari yang dapat menimbulkan resiko baik bagi pengelola maupun wisatawan. Bahkan dalam siklus hidup mata pencaharian masyarakat nelayan pesisir Kabupaten Bintan, saat musim angin utara berlangsung yang dimulai sekitar bulan Oktober

sampai dengan Pebruari mereka beristirahat tidak turun kelaut. Dengan jangka waktu yang cukup panjang tersebut tentu berdampak pada pendapatan nelayan, dan juga secara bersamaan usaha wisata bahari yang bersentuhan dengan laut juga terhenti. Resiko wisata di pantai dan dilaut dapat diperkecil dengan hadirnya pemerintah melalui sinergi institusi-institusi yang berhubungan dengan laut untuk memberikan jaminan rasa aman dan keselamatan. Pemerintah Kabupaten Bintan harus dapat berkoordinasi dengan pihak penjaga pantai yang terdiri dari beberapa unit dibawah Kementerian Perhubungan, Kepolisian Air dan Udara (POLAIRUD), TNI Angkatan Laut, Search and Rescue (SAR) dan tentunya Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memiliki informasi aktual atas kondisi cuaca dan perubahan iklim. Dari beberapa institusi tersebut dapat dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Bahari yang bekerja selama kondisi cuaca tidak menentu tersebut. Dengan penjagaan oleh SATGAS Bahari, maka aktivitas nelayan untuk memperoleh pendapatan dilaut baik sebagai nelayan ataupun sebagai pengelola dan operator wisata bahari akan dapat berlangsung. Bahkan dalam kondisi yang beresiko kadangkala menjadi suatu objek menarik bagi para wisatawan, karena memiliki tantangan tersendiri. Selain itu jaminan sosial dalam bentuk asuransi bagi stakeholder wisata bahari juga perlu diintegrasikan dalam sistem pengelolaan objek wisata bahari berbasis masyarakat.

#### **7.2.5.4. Membangun Kemitraan Jaringan Pengembangan Bisnis Jasa Pariwisata Bahari Berbasis Teknologi Dan Komunikasi (Penerapan Sistem Pembayaran Elektronik)**

Perkembangan revolusi industri generasi 4.0 membawa konsekuensi atas aktivitas kehidupan manusia yang dipermudah melalui teknologi informasi dan komunikasi, atau juga sering disebut sebagai era digitalisasi. Salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi melalui internet didunia usaha wisata adalah untuk media pemasaran. Banyak agen perjalanan wisata yang saat ini

terintegrasi dengan sebuah sistem Pelayanan online yang mengintegrasikan layanan penyediaan tiket transportasi udara, darat, dan laut dengan hotel serta destinasi wisata yang dikemas dalam bentuk paket-paket perjalanan. Sebuah sistem aplikasi telah dapat dibangun untuk mempermudah konsumen dalam membeli paket-paket perjalanan wisata secara lengkap dan dengan mekanisme pembayaran yang semakin mudah. Mekanisme pembayaran yang digunakan di era digital sudah semakin maju dengan cara internet banking ataupun dengan uang digital/uang elektronik. Bahkan cara pembayaran pun semakin mudah dengan hanya menggunakan smartphone untuk memindai Quick Response (QR) Code.

Pengelola wisata bahari baik yang melakukan secara mandiri/individu ataupun yang tergabung dalam BUMDes harus dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan agar dapat masuk kedalam sistem jaringan pelayanan travel online. Jika memungkinkan, maka pemerintah Kabupaten Bintan yang menyediakan aplikasi untuk menampung keseluruhan destinasi dan objek wisata yang dapat melakukan pemesanan dan pembayaran langsung kepada masyarakat ataupun BUMDes pengelola objek wisata bahari di Kabupaten Bintan.

### **7.3. Tahapan Tumbuh dan Mandiri di Tahun 2021**

Pada tahun ketiga, capaian atas pengembangan optimalisasi wisata bahari di Kabupaten Bintan akan berada pada tahapan tumbuh dan mandiri. Dimana Pemerintah Kabupaten Bintan dapat melakukan monitoring dan penilaian atas

keberlanjutan dari masing-masing pengelola wisata bahari, baik secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh BUMDes. Pada tahapan ini hal-hal yang perlu diperkuat akan terus dilakukan dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan dilingkungan eksternal makro yang cepat mengalami perubahan. Indikator utama dari penilaian keberhasilan capaian optimalisasi wisata bahari berbasis masyarakat adalah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang dilihat dari pola tingkat konsumsinya. Indikator lainnya adalah pada aspek kualitas hidup dari masyarakat nelayan pesisir Kabupaten Bintan, yang dilihat dari partisipasi dalam pendidikan dan cakupan akses pelayanan kesehatan yang diterimanya.

#### **7.4. Rekomendasi Kebijakan**

Sebagai bentuk rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil kajian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan bantuan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam optimalisasi pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat adalah secara tidak langsung;
- b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyediaan sarana pendukung yang menghubungkan akses antara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan Kawasan Wisata Bahari berbasis Masyarakat;
- c. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pemanfaatan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat perlu segera dilakukan dengan mengakomodir kepentingan publik dan keberlanjutan daya dukung alam;

- d. Kebijakan “one permit and one certificate” yang bermakna penyatuan izin dalam satu rangkaian proses dan satu sertifikasi kelayakan atas semua aktivitas pelayanan yang diberikan dalam aktivitas wisata bahari;
- e. Kebijakan fasilitasi sinergisitas diantara Agen Perjalanan Wisata dengan Masyarakat pengelola destinasi dan objek wisata bahari;
- f. Kebijakan fasilitasi pembentukan SATGAS Bahari lintas instansi stakeholder kawasan pesisir pantai dan laut dibawah Koordinasi Pemerintah Kabupaten Bintan dengan penyediaan alokasi anggaran di APBD Kabupaten Bintan.